



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemetongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 19);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.557.909.717.848,21 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.020.052.532.113,21 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.921.136.897.166,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.121.878.920,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp316.148.941.374,21
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp332.644.814.653,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.921.136.897.166,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - e. Pajak Rokok;
 - f. Pajak Alat Berat.
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp720.900.000.000,00.
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp510.100.000.000,00.
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp940.000.000.000,00.
- (5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00.
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp739.086.897.166,00.
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp720.900.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang sedan direncanakan sebesar Rp14.237.500.000,00.
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Jeep direncanakan sebesar Rp60.703.500.000,00.
 - c. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Minibus direncanakan sebesar Rp299.237.400.000,00.
 - d. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Microbus direncanakan sebesar Rp1.743.100.000,00.
 - e. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar Rp653.000.000,00.
 - f. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Pick Up direncanakan sebesar Rp58.435.600.000,00.
 - g. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Light Truck direncanakan sebesar Rp72.678.300.000,00.
 - h. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Truck direncanakan sebesar Rp53.176.900.000,00.
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Blind Van direncanakan sebesar Rp1.317.700.000,00.
 - j. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua direncanakan sebesar Rp158.600.800.000,00.
 - k. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga direncanakan sebesar Rp104.700.000,00.
 - l. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp11.500.000,00.
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp510.100.000.000,00. yang terdiri atas:
 - a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Sedan direncanakan sebesar Rp2.054.100.000,00.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Jeep direncanakan sebesar Rp41.131.300.000,00.
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Minibus direncanakan sebesar Rp173.793.300.000,00.
 - d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Micro Bus direncanakan sebesar Rp1.189.800.000,00.
 - e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar Rp393.000.000,00.
 - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Pick Up direncanakan sebesar Rp53.620.000.000,00.
 - g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Light Truck direncanakan sebesar Rp20.755.000.000,00.
 - h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Truck direncanakan sebesar Rp18.567.200.000,00.
 - i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Blind Van direncanakan sebesar Rp2.712.400.000,00.
 - j. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Dua direncanakan sebesar Rp194.088.200.000,00.
 - k. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Tiga direncanakan sebesar Rp1.676.600.000,00.
 - l. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp119.100.000,00.

- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp940.000.000.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Bensin direncanakan sebesar Rp441.800.000.000,00.
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Solar direncanakan sebesar Rp498.200.000.000,00
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp739.086.897.166,00. yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp739.086.897.166,00.
- (6) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00. yang terdiri atas:
 - a. Pajak Alat Berat direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (7) Anggaran Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00. yang terdiri atas:
 - a. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp450.121.878.920,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp433.852.732.340,00.
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp16.179.146.580,00.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp90.000.000,00.
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp316.148.941.374,21 yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp59.681.370.779,41.
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp256.467.570.594,80.
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp332.644.814.653,00. yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp274.743.000.000,00.
 - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp28.800.401.324,00.
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp50.000.000,00.
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp422.953.760,00.
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp11.251.185.850,00.

- f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.
- g. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp17.372.273.719,00.

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.524.066.287.000,00. yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp3.524.066.287.000,00 yang terdiri atas:

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp3.489.381.614.000,00 yang diuraikan atas:
 - a. Anggaran Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp184.960.121.000,00.
 - b. Anggaran Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp2.172.325.726.000,00.
 - c. Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp119.271.566.000,00.
 - d. Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp1.012.824.201.000,00.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp34.684.673.000,00 yang diuraikan atas:
 - a. Anggaran Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp34.684.673.000,00

Pasal 10

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp13.790.898.735,00 yang terdiri atas Anggaran Pendapatan Hibah direncanakan sebesar Rp13.790.898.735,00.

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.632.909.717.848,21 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp5.203.967.155.913,75 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.916.687.302.416,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.897.854.129.785,63.

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp385.958.861.512,62.
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.466.862.199,50.

Pasal 13

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.916.687.302.416,00 yang terdiri atas:

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp1.639.350.040.332,57.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp985.170.463.618,93.
- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00.
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.250.840.284,50.
- (5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.980.366.110,00.
- (6) Belanja Pegawai BOSP direncanakan sebesar Rp63.303.364.600,00.
- (7) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp149.633.930.000,00.

Pasal 14

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.639.350.040.332,57 yang terdiri atas:

- (1) Belanja Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp1.226.857.417.516,84.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp115.873.771.035,54.
- (3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp11.748.185.885,98.
- (4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp91.234.845.570,85.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp24.697.537.405,98.
- (6) Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp66.701.695.642,94.
- (7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp4.894.106.188,01.
- (8) Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp1.037.229.238,42.
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp82.195.611.481,01.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp4.209.665.887,00.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp5.494.086.108,00.
- (12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp4.405.888.372,00

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 direncanakan sebesar Rp985.170.463.618,93 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp407.100.330.726,93.

- b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.284.293.892,00.
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp1.118.000.000,00.
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp575.667.839.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00.
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp377.496.000,00.
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp438.238.920,00.
 - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp231.120.000,00.
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp3.909.780.000,00.
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp314.766.000,00.
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp420.471.000,00.
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00.
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00.
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp541.638.050,00.
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp25.086.187.500,00.
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp17.472.000.000,00.
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp385.200.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 direncanakan sebesar Rp2.250.840.284,50 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp75.600.000,00.
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.584.000,00.
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp136.080.000,00.
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp8.111.040,00.
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.203.618,00.
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp261.626,50.
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.

- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 direncanakan sebesar Rp5.980.366.110,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp432.000.000,00.
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.548.366.110,00.
- (5) Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 direncanakan sebesar Rp63.303.364.600,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp63.303.364.600,00.
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 7 direncanakan sebesar Rp149.633.930.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp149.633.930.000,00.

Pasal 16

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 direncanakan sebesar Rp1.897.854.129.785,63 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp433.281.769.882,80.
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp611.344.827.654,24.
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp132.432.343.650,00
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp214.987.458.644,59.
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp84.458.644.500,00.
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp203.706.644.454,00.
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp217.642.441.000,00.

Pasal 17

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp433.281.769.882,80 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp430.676.224.982,80.
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai direncanakan sebesar Rp261.681.000,00.
- c. Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp2.343.863.900,00.

Pasal 18

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp611.344.827.654,24 yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp291.892.950.768,00.
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp149.929.408.171,04.
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp309.000.000,00.
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp32.858.120.100,00.
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp46.971.904.600,00.
- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp3.000.000,00
- g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp119.000.000,00.

- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp56.603.891.453,20.
- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp20.774.654.562,00.
- j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) direncanakan sebesar Rp159.685.000,00.
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN direncanakan sebesar Rp551.950.000,00.
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp11.091.263.000,00.

Pasal 19

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp132.432.343.650,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp98.500.000,00.
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp41.341.261.420.
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp13.244.375.480,00.
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp77.588.234.750,00.
- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp123.972.000,00.
- f. Belanja Pemeliharaan Aset tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp36.000.000,00.

Pasal 20

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp214.987.458.644,59 yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp214.551.893.144,59.
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp435.565.500,00.

Pasal 21

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp84.458.644.500,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp11.540.959.500,00.
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp72.917.685.000,00.

Pasal 22

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f direncanakan sebesar Rp203.706.644.454,00 yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp203.706.644.454,00.

Pasal 23

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g direncanakan sebesar Rp217.642.441.000,00 yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp217.642.441.000,00.

Pasal 24

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp385.958.861.512,62 yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00.
- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp2.420.000.000,00.
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp151.322.632.712,62.
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp10.488.808.800,00.
- e. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp206.427.420.000,00.

Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.466.862.199,50 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp718.775.000,00 yang diuraikan:
 - 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp450.000.000,00.
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp268.775.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp748.087.199,50.

Pasal 26

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp980.196.930.133,19 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp166.534.644.600,00 yang terdiri atas:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp3.203.630.300,00.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp2.669.352.000,00.
 - 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp41.579.000,00.
 - 4) Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp356.505.000,00.
 - 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp26.295.098.640,00.
 - 6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp1.007.665.000,00.
 - 7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp10.455.477.654,00.
 - 8) Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp19.992.482.400,00.
 - 9) Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp16.136.996.000,00.
 - 10) Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp41.748.000,00.
 - 11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp3.624.000.000,00.
 - 12) Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp46.143.000,00.
 - 13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP direncanakan sebesar Rp40.958.744.106,00.
 - 14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp41.705.223.500,00.

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp122.340.756.701,75 terdiri atas:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp86.382.681.701,75.
 - 2) Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp3.017.655.000,00.
 - 3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp231.600.000,00.
 - 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp32.708.820.000,00.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp666.545.451.791,44 terdiri atas:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp603.075.917.972,00.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp63239.533.819,44.
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp230.000.000,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp23.932.804.840,00 terdiri atas:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp252.900.000,00.
 - 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp23.659.904.840,00.
 - 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp20.000.000,00.
- e. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp843.272.200,00 terdiri atas:
 - 1) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp593.272.200,00.
 - 2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp42.472.500.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp42.472.500.000,00.

Pasal 28

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.406.273.131.801,27 yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp1.406.273.131.801,27.

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III.B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran IV.A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IV.B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
7. Lampiran V.A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
8. Lampiran V.B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
9. Lampiran VI.A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
10. Lampiran VI.B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
11. Lampiran VI.C : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 – 12 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 – 12 - 2024

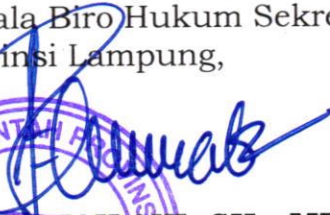
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

dto

FREDY SM

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung,


PUADI JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004





PROVINSI LAMPUNG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.020.052.532.113,21
4.1.01	Pajak Daerah	2.921.136.897.166,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	720.900.000.000,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	14.237.500.000,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.443.000.000,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	204.000.000,00
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	11.100.000,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	579.400.000,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.703.500.000,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	60.092.500.000,00
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	18.400.000,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	592.600.000,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	299.237.400.000,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	297.299.200.000,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	74.400.000,00
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	7.400.000,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1.856.400.000,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	1.743.100.000,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1.143.000.000,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	448.600.000,00
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	11.100.000,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	140.400.000,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	653.000.000,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	222.200.000,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	410.400.000,00
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	3.700.000,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	16.700.000,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	58.435.600.000,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	57.758.600.000,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	161.100.000,00
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	11.100.000,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	504.800.000,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	72.678.300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	47.903.900.000,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	24.535.500.000,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	7.400.000,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	231.500.000,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	53.176.900.000,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	20.308.300.000,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	32.820.000.000,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	3.800.000,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	44.800.000,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.317.700.000,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1.306.700.000,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	600.000,00
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	800.000,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	9.600.000,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	158.600.800.000,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	157.934.800.000,00
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	7.400.000,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	658.600.000,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	104.700.000,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	91.500.000,00
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	400.000,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	12.800.000,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	11.500.000,00
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	10.700.000,00
4.1.01.01.14.0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	400.000,00
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	400.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	510.100.000.000,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.054.100.000,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.054.100.000,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	41.131.300.000,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	41.131.300.000,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	173.793.300.000,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	173.793.300.000,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.189.800.000,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.189.800.000,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	393.000.000,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	393.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	53.620.000.000,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	53.620.000.000,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	20.755.000.000,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	20.755.000.000,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	18.567.200.000,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	18.567.200.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.712.400.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.712.400.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	194.088.200.000,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	194.088.200.000,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.676.600.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.676.600.000,00
4.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	119.100.000,00
4.1.01.02.14.0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	119.100.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	940.000.000.000,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	441.800.000.000,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	441.800.000.000,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	498.200.000.000,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	498.200.000.000,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	8.000.000.000,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	8.000.000.000,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	8.000.000.000,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	739.086.897.166,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	739.086.897.166,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	739.086.897.166,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	1.000.000.000,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	1.000.000.000,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	1.000.000.000,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.050.000.000,00
4.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.050.000.000,00
4.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.050.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	450.121.878.920,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	433.852.732.340,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	428.362.317.840,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	428.112.141.840,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	250.176.000,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.490.414.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	5.490.414.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	16.179.146.580,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.425.961.380,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.593.030.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	78.500.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	9.521.949.380,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.311.260.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	921.222.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	450.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	450.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	553.405.650,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	553.405.650,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	78.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	78.000.000,00
4.1.02.02.09	<i>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</i>	<i>648.573.850,00</i>
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	648.573.850,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.023.205.700,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	398.705.700,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	337.500.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	160.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	127.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	90.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	90.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	<i>Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)</i>	<i>90.000.000,00</i>
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	316.148.941.374,21
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	316.148.941.374,21
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	59.681.370.779,41
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	59.681.370.779,41
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	256.467.570.594,80
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	256.467.570.594,80
4.1.04	<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>	<i>332.644.814.653,00</i>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	274.743.000.000,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	274.500.000.000,00
4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	274.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	37.000.000,00
4.1.04.01.02.0031	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	37.000.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	153.000.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	153.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	53.000.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	53.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	28.800.401.324,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	28.700.401.324,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	28.700.401.324,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.251.185.850,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.708.725.850,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	247.201.150,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	915.710.450,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	3.355.908.500,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	21.251.700,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	14.099.350,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	1.236.011.000,00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	974.364.700,00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1.507.863.350,00
4.1.04.12.01.0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	21.212.750,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	2.411.373.950,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	1.251.000,00
4.1.04.12.01.0064	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	2.322.300,00
4.1.04.12.01.0068	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	155.650,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	490.460.000,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.271.877,50
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	52.270.255,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	171.240.802,50

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.844.277,50
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	600.000,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	69.602.642,50
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	45.346.640,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	51.024.012,50
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.939.438,50
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	91.158.359,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	761.695,00
4.1.04.12.02.0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	400.000,00
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	50.000.000,00
4.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	50.000.000,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	2.000.000,00
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	2.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000,00
4.1.04.13.02	<i>Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha</i>	5.000.000,00
4.1.04.13.02.0018	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	5.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	17.372.273.719,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	204.486.271,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	204.486.271,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.167.787.448,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.351.215.253,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.816.572.195,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.524.066.287.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.489.381.614.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	184.960.121.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	137.165.847.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	28.633.710.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	96.107.824.344,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.664.232.656,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.760.080.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	40.723.336.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	29.489.308.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	455.665.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	339.255.000,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.521.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	10.436.587.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	7.070.938.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	7.070.938.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.172.325.726.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	2.172.325.726.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	2.172.325.726.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.132.095.767.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	119.271.566.000,00
4.2.01.09.01.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	4.575.840.000,00
4.2.01.09.01.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	228.300.000,00
4.2.01.09.01.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	37.040.000.000,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	17.568.573.000,00
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00
4.2.01.09.01.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00
4.2.01.09.01.0102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar	10.000.000.000,00
4.2.01.09.01.0104	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	22.989.986.000,00
4.2.01.09.01.0110	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar	12.436.371.000,00
4.2.01.09.01.0112	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	2.605.468.000,00
4.2.01.09.01.0113	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	11.079.878.000,00
4.2.01.09.01.0117	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	747.150.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	1.012.824.201.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	526.641.078.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	11.415.000.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	443.110.552.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	10.560.770.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.566.874.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.356.295.000,00
4.2.01.09.02.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.723.061.000,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	749.911.000,00
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	150.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.684.673.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	34.684.673.000,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	34.684.673.000,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.684.673.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.790.898.735,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.790.898.735,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.677.319.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.677.319.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.677.319.000,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00
	Jumlah Pendapatan	7.557.909.717.848,21
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	5.203.967.155.913,75
5.1.01	Belanja Pegawai	2.916.687.302.416,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.350.040.332,57
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.226.857.417.516,84
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	809.625.583.655,09
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	417.231.833.861,75
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	115.873.771.035,54
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	80.537.069.290,44
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	35.336.701.745,10
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.748.185.885,98
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11.748.185.533,98
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	352,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.234.845.570,85
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	62.278.729.430,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.956.116.140,85
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.697.537.405,98
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.474.970.399,98
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.222.567.006,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	66.701.695.642,94
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	44.160.828.645,94
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	22.540.866.997,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.894.106.188,01
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.849.106.981,81
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.044.999.206,20
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.037.229.238,42
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.012.478.417,29
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24.750.821,13
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	82.195.611.481,01
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	60.193.950.264,37
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	22.001.661.216,64
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.209.665.887,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.597.405.236,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.612.260.651,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.494.086.108,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	4.792.215.708,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	701.870.400,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.405.888.372,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.405.888.372,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	985.170.463.618,93
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	407.100.330.726,93
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	372.973.273.575,05
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	34.127.057.151,88
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.284.293.892,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.284.293.892,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.118.000.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.118.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	575.667.839.000,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	27.057.750.000,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.304.750.000,00
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.035.000.000,00
5.1.01.02.06.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	225.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	490.745.695.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.566.874.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	10.732.770.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	70.998.297.470,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.696.400.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.696.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	377.496.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	377.496.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	438.238.920,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	438.238.920,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	231.120.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	231.120.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.909.780.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.909.780.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	314.766.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	314.766.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	420.471.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	420.471.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.825.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.825.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	541.638.050,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	541.638.050,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	25.086.187.500,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	477.262.500,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	477.262.500,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	477.262.500,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	23.654.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.472.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.472.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	385.200.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	385.200.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.250.840.284,50
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.203.618,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.203.618,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	261.626,50
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	261.626,50
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.000.000.000,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	661.752.548,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	643.292.440,00
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	689.961.415,00
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	4.993.597,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.980.366.110,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	432.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	432.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.548.366.110,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.548.366.110,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	63.303.364.600,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	63.303.364.600,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	63.303.364.600,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	149.633.930.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	149.633.930.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	149.633.930.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.897.854.129.785,63
5.1.02.01	Belanja Barang	433.281.769.882,80
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	430.676.224.982,80
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.534.587.800,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.166.255.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.197.294.200,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.145.852.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	937.236.200,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	94.600.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	61.444.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	16.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.524.110.865,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	111.403.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	26.160.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	67.650.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	87.250.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.292.253.379,40
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	567.116.605,94
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	98.730.266.795,46
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	589.546.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	134.444.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.463.043.900,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.388.383.460,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.585.623.697,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	437.057.200,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	853.511.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.018.789.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.855.089.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	895.912.860,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.964.048.669,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.773.979.900,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	87.324.424.207,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.877.974.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	66.053.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.143.296.744,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.757.498.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	91.350.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.150.471.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	221.486.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.396.007.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.004.674.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	500.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.020.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	374.585.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	42.775.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	2.526.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	925.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.558.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.390.321.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	235.875.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	261.681.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	221.111.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	18.876.000,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	14.188.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	7.506.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.343.863.900,00
5.1.02.01.04.0045	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	164.835.000,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	251.922.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.426.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	445.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.067.000,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	8.520.000,00
5.1.02.01.04.0131	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	10.500.000,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	40.842.000,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.905.000,00
5.1.02.01.04.0375	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	1.821.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.500.000,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	296.162.000,00
5.1.02.01.04.0494	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.359.000.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	109.918.900,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	611.344.827.654,24
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	291.892.950.768,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.139.844.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.991.396.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	160.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.073.100.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	85.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	765.924.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	142.500.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.740.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.293.960.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.772.716.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	253.456.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	880.200.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	217.992.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	14.014.224.780,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	274.764.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.669.168.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	209.550.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	715.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.083.166.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.612.954.500,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	62.228.579.700,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.314.188.800,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.979.138.180,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.327.634.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	20.160.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.779.800,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	77.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	148.480.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	14.850.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.416.451.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	569.140.100,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	297.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	378.438.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.208.922.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	234.400.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	522.293.200,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	250.049.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	50.700.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	834.800.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	3.300.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	41.211.235.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.380.308.463,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	448.565.980,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	25.670.235.270,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.631.145.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.358.288.690,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	294.003.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	32.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.407.136.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.364.908.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	453.311.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	65.537.010,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.954.848.295,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.475.010.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	102.000.000,00
5.1.02.02.02	<i>Belanja luran Jaminan/Asuransi</i>	149.929.408.171,04
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	95.652.926.751,04
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	40.500.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.961.206.720,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	815.274.700,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	309.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	295.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	14.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.858.120.100,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	60.750.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	3.245.850.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.635.388.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.560.582.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	143.264.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	168.236.100,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	360.666.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	18.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.480.854.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	196.908.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	22.224.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.633.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	390.240.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	203.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	13.750.000,00
5.1.02.02.04.0141	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio VHF	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	742.230.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	417.760.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	2.969.768.000,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	536.400.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	46.971.904.600,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	966.080.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	5.600.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	23.637.247.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	162.000.000,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	166.800.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	286.400.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	157.300.000,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	18.750.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	237.968.600,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	21.281.759.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.000.000,00
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	199.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	115.000.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	48.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	36.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	56.603.891.453,20
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.391.276.279,20
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	178.139.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.038.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	9.636.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	18.411.476.349,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	3.091.389.590,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.060.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	999.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	308.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.357.840.100,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	425.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.785.000.000,00
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	6.528.923.100,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	60.000.000,00
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	5.508.695.035,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.975.152.000,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	100.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.774.654.562,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	120.000.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	230.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	196.992.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	195.764.000,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	458.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kepuasan	220.000.000,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	225.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	278.616.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	13.490.980.862,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	161.279.700,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	4.898.022.000,00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	200.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	159.685.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	159.685.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	551.950.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	45.550.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	506.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.091.263.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.088.709.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.018.804.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.983.750.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	132.432.343.650,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	98.500.000,00
5.1.02.03.01.0016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	68.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.341.261.420,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	64.737.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	64.935.000,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	52.902.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	144.855.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	74.925.000,00
5.1.02.03.02.0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	118.270.000,00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	98.280.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	226.450.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	26.150.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	24.984.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	18.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.393.871.400,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.770.370.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	261.505.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.920.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	556.618.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	19.500.000,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	19.500.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	34.650.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	150.171.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.998.577.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	843.150.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	31.551.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.595.313.000,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	5.728.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.140.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	9.700.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.000.000,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	34.500.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	147.901.000,00
5.1.02.03.02.0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	83.860.000,00
5.1.02.03.02.0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	59.770.000,00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	9.665.000,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	83.647.120,00
5.1.02.03.02.0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	26.150.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	947.123.600,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	268.460.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	351.218.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	636.950.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	131.604.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	736.160.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	93.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.244.375.480,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.783.313.180,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	38.740.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	58.500.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.800.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	802.396.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	4.080.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	174.896.000,00
5.1.02.03.03.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	81.600.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.028.280.000,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	1.245.770.300,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.588.234.750,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	59.521.004.680,00
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	3.708.000.000,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	2.620.305.300,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	10.888.803.270,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	89.320.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	2.597.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	100.032.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	521.672.500,00
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	19.500.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	117.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	123.972.000,00
5.1.02.03.05.0037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	123.972.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	36.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	36.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	214.987.458.644,59
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	214.551.893.144,59
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.030.099.424,59
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.157.908.420,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.953.606.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.410.279.300,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	435.565.500,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	435.565.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	84.458.644.500,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.540.959.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.900.775.500,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	8.640.184.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	72.917.685.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	17.553.965.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	55.363.720.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	203.706.644.454,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	203.706.644.454,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	197.448.700.454,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	6.257.944.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	217.642.441.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	217.642.441.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	217.642.441.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	385.958.861.512,62
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.300.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.000.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.000.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.420.000.000,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.420.000.000,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.420.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	151.322.632.712,62
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	69.607.826.010,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.365.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.237.324.010,00
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.502.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.328.875.700,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.000.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.313.875.700,00
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	58.185.931.002,62
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.635.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	37.550.931.002,62
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.200.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.488.808.800,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.488.808.800,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.488.808.800,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	206.427.420.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	206.427.420.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	206.427.420.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.466.862.199,50
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	718.775.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	450.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	450.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	268.775.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	268.775.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	748.087.199,50
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	748.087.199,50
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	748.087.199,50
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.000.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.000.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	980.196.930.133,19
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.534.644.600,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.203.630.300,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.640.000.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	2.640.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	563.630.300,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	305.625.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	27.570.300,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	230.435.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.669.352.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.669.352.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.891.040.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	778.312.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	41.579.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.425.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	7.425.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.600.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	2.600.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	31.554.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	31.554.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	356.505.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	356.505.000,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	356.505.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.295.098.640,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	12.553.823.980,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4.108.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	29.204.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	265.662.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.254.849.980,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.143.090.660,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.704.665.840,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	22.204.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.815.860.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	18.427.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.571.386.820,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	10.547.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.598.184.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	431.820.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	298.370.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	333.556.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	55.528.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	220.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	258.910.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.007.665.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	943.615.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	52.288.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	397.958.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	37.150.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	456.219.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	64.050.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	64.050.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.455.477.654,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.100.178.654,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	59.517.000,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	34.488.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	5.006.173.654,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.355.299.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.355.299.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	19.992.482.400,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	332.736.400,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	196.578.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	136.158.400,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	19.495.200.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	745.200.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	18.750.000.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	164.546.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	164.546.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.136.996.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.573.348.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.248.426.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.324.922.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.563.648.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	57.450.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	186.532.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.319.666.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	41.748.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	41.748.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	41.748.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.624.000.000,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	3.624.000.000,00
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	3.624.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	46.143.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	46.143.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	46.143.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	40.958.744.106,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	40.958.744.106,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	40.903.723.106,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	55.021.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.705.223.500,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.705.223.500,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.705.223.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.340.756.701,75
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	86.382.681.701,75

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.901.136.291,75
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	47.924.914.164,15
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	2.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.081.253.328,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.999.991.600,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.699.776.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.967.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	99.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.553.991.999,60
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	55.676.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	719.553.400,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.299.979.800,00
5.2.03.01.02	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal</i>	1.481.545.410,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	799.982.730,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	199.984.680,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	481.578.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	3.017.655.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.017.655.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	3.017.655.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	231.600.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	231.600.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	231.600.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	32.708.820.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	32.708.820.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	32.708.820.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	666.545.451.791,44
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	603.075.917.972,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	545.029.909.067,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	545.029.909.067,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	58.046.008.905,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	58.046.008.905,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	63.239.533.819,44
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.789.912.314,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	21.789.912.314,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	41.449.621.505,44

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	41.449.621.505,44
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	230.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	230.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	230.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.932.804.840,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	252.900.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	252.900.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	252.900.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	23.659.904.840,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	23.659.904.840,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Regular	23.627.869.840,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	32.035.000,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	843.272.200,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	593.272.200,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	593.272.200,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	100.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	176.272.200,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	50.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	267.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	42.472.500.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	42.472.500.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	42.472.500.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	42.472.500.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	42.472.500.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.406.273.131.801,27
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.405.273.131.801,27
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.405.273.131.801,27
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.193.916.204.329,20
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.193.916.204.329,20
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	211.356.927.472,07

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	211.356.927.472,07
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	7.632.909.717.848,21
	Total Surplus/(Defisit)	-75.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	75.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	75.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	75.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bandar Lampung, 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR,

dto

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung,

